LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN APRIL DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Kamis, 8 Mei 2025

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 33,88 %

b. Keuangan = 5.689.739.531 (29,75%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	35.277.000			9.510.000		
1	Pelayanan Informasi	20.727.000	1,60	1,20	300.000	(0,40)	

2	Konsultasi dan Koordinasi	14.550.000	52,07	36,94	9.210.000	(15,13)	Anggaran perjalanan dinas Menyesuaikan Pelaksanaan Kegiatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.200.000			4.744.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	36.200.000	21,56	13,11	4.744.000	(8,45)	Menyesuaikan kebutuhan dengan adanya undangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	532.763.000			168.182.000		
1	Penguatan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	252.807.000	52,09	47,60	115.410.000	(4,49)	Kegiatan Dialog Interaktif Kartini diundur karena menyesuaikan jadwal pimpinan
2	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	279.956.000	24,33	19,30	52.772.000	(5,03)	HUT BKOW sudah dilaksanakan namun sisa anggaran dari lomba berkebaya (mmt, makan minum, juri, hadiah) dialihkan untuk program prioritas

							BKOW yang baru
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	120.637.000			32.762.148		
1	Advokasi Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan	24.793.000	11,47	11,20	2.843.000	(0,27)	
2	Pengembangan Konten Media KIE	95.844.000	31,20	30,85	29.919.148	(0,35)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan Perempuan danÂ Anak							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.961.000			4.414.700		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6.961.000	63,88	63,43	4.414.700	(0,45)	

	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	8	0	0			

	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Anggaran Pemeliharaan meningkat karena terjadi penambahan titik kebocoran (UPTD);
2. HUT BKOW sudah dilaksanakan namun sisa anggaran dari lomba berkebaya (mmt, makan minum, juri, hadiah) dialihkan untuk program prioritas BKOW yang baru (PP);
3. Kegiatan Dialog Interaktif Kartini belum dapat dilaksanakan sesuai RKO karena menyesuaikan jadwal pimpinan (PP);

4. Rakor pencegahan kekerasan direncanakan bulan Mei tetapi diusahakan menyesuaikan dengan rangkaian Hari Anak (PA);
5. Lokus Kegiatan BKL apakah menyesuaikan dengan lokus kecamatan berdaya atau berdasarkan data lansia terbanyak (KS);
6. Dana BOKB belum dapat digunakan karena masih menunggu hasil koordinasi TPPS Provinsi (KIE);
7. Kegiatan PPEP yang seharusnya dilakukan ditingkat desa, tetapi karena harus fokus pada lokasi kecamatan berdaya, sehingga kendalanya jarak antar desa berjauhan, dan akan menyulitkan koordinasi secara kelompok (peserta dari berbagai desa);
8. RAD PUG Jateng masih proses di biro hukum;
9. Belum semua GDPK 5 pilar yang terintegrasi dengan Dokumen perencanaan;
10. Belum semua anggota kader pokja kampung kb berpartisipasi aktif untuk meningkatkan klasifikasi kampung kb.

Upaya

1. Menggeser anggaran sisa tagihan air untuk pemeliharaan (UPTD);
2. Sisa anggaran digunakan untuk kegiatan dari program prioritas BKOW yang lain (PP);
3. Kegiatan Dialog Interaktif Kartini akan dilaksanakan bulan Mei (PP);
4. Penyesuaian waktu kegiatan rakor pencegahan kekerasan anak dengan salur I DAK-NF (PA);
5. Konsep PPEP versi kecamatan berdaya akan dimatangkan dengan stakeholder terkait;
6. Mendorong Biro hukum untuk segera menyelesaikan proses pematangan RAD PUG Provinsi;
7. SE Sekda untuk mendorong integrasi GDPK 5 pilar ke dokumen perencanaan;
8. Advokasi kader pojka kampung KB bekerjasama dengan BKKBN.
9. MOU antara kemendukbangga dengan gubernur jateng tentang SSK masih dalam proses penyusunan.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak (UPTD);
2. Kegiatan Dialog Interaktif Kartini (PP);
3. Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota (PP);
4. FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak (PA);
5. Rakor Pencegahan Kekerasan Anak (DAK-NF) (PA);
6. Workshop Advokasi Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Kelompok BKL (KS);
7. Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) KLA (PHA);
8. Rakor puspaga kab/kota by zoom (PHA);
9. Ngopi Penak (PHA);
10. Safari Pelayanan KB di 5 titik (KB);
11. Advokasi peningkatan KB Perusahaan di 3 titik (KIE);
12. Rakor TPPS tingkat Provinsi (KIE);
13. Advokasi penyusunan dan pemanfaatan GDPK 5 pilar di 2 titik (Dalduk);
14. Lomba implementasi kebijakan penyelenggaraan kampung KB di 5 titik (Dalduk);
15. Dikpol 4 titik (KG);
16. Sosialisasi TPK2D di Kendal (KG).

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;

4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. Semua kegiatan diarahkan untuk mendukung program prioritas Gubernur baru

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan April 2025, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Kamis, 8 Mei 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. Emi Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001